JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam: *A Systematic Literature Review*

Lika Yunistiyawati[1*], Dudung Ma'ruf Nuris[2], Risky Firmansyah[3]
[1,2,3] Universitas Negeri Malang, Indonesia
[*]E-mail: lika.yunistiyawati.2504218@students.um.ac.id

Information Article
History Article
Submission: 20-10-2026
Revision: 31-10-2026
Published: 18-11-2026

DOI Article:
10.62421/jibema. v4i2.933

A B S T R A K

Akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam merupakan aspek fundamental pengelolaan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mereview dan mensintesis literatur yang ada mengenai akuntabilitas keuangan perspektif Islam pada pesantren guna memetakan tren penelitian, mengidentifikasi kerangka teoretis, dan merumuskan agenda penelitian ke depan. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan panduan protokol PRISMA, penelitian ini mereview 15 artikel relevan yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Hasil menunjukkan bahwa konsep amanah (kepercayaan), hablumminallah (pertanggungjawaban kepada Allah), dan hablumminannas (pertanggungjawaban kepada sesama manusia) melandasi praktik akuntabilitas keuangan di pesantren. Metode penelitian kualitatif, khususnya studi *fenomenologis*, mendominasi literatur. Teori legitimasi dan *Shariah Enterprise Theory* (SET) merupakan kerangka teoretis yang paling sering digunakan. Tantangan utama meliputi ketiadaan standar pelaporan keuangan berbasis Islam, peran sentral kyai dalam tata kelola keuangan, dan terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Perspektif Islam, Pesantren, Amanah, Tinjauan Literatur Sistematis

A B S T R A C T

Financial accountability in Islamic perspective is a fundamental aspect of managing Islamic educational institutions, particularly pesantren (Islamic boarding schools) in Indonesia. This study aims to systematically review and synthesize existing literature on financial accountability from an Islamic perspective in pesantren to map research trends, identify theoretical frameworks, and formulate a future research agenda. Using the Systematic Literature Review (SLR) method guided by the PRISMA protocol, this study reviewed 15 relevant articles published between 2014 and 2024. The results show that the concept of amanah (trustworthiness), hablumminallah (accountability to God), and hablumminannas (accountability to fellow human beings) underpin financial accountability practices in pesantren. Qualitative research methods, particularly phenomenological studies, dominate the literature. Legitimacy theory and Shariah Enterprise Theory (SET) are the most frequently applied theoretical frameworks. Key challenges include the absence of standardized Islamic financial reporting, the central role of the kyai in financial governance, and limited use of information

Acknowledgment

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

technology in financial administration. This study contributes to Islamic accounting literature by providing a comprehensive map of research developments and a future research agenda focused on digital financial governance in pesantren.

Key word: *Financial Accountability, Islamic Perspective, Pesantren, Amanah, Systematic Literature Review*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pesantren lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta nilai-nilai keislaman masyarakat. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial yang mengelola berbagai sumber dana, baik yang berasal dari masyarakat, donatur, pemerintah, maupun unit usaha pesantren sendiri. Besarnya pengelolaan dana tersebut menuntut adanya sistem akuntabilitas keuangan yang transparan dan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas keuangan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertang-gungjawaban kepada manusia, tetapi juga sebagai tanggung jawab kepada Allah Swt. Konsep ini didasarkan pada nilai amanah yang mengharuskan setiap pengelola keuangan menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan transparan. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi keuangan secara benar dan jelas. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam tidak sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari ibadah dan bentuk ketakwaan kepada Allah Swt.

Pelaksanaan akuntabilitas keuangan di pesantren masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pesantren yang masih menggunakan sistem pencatatan keuangan secara manual dan belum mengikuti standar akuntansi yang baku. Selain itu, pola kepemimpinan yang terpusat pada figur kyai membuat pengelolaan keuangan sering dilakukan secara personal dan kurang terdokumentasi dengan baik. Kurangnya regulasi khusus mengenai tata kelola keuangan pesantren juga menyebabkan praktik pengelolaan keuangan di setiap pesantren berbeda-beda. Walaupun Kementerian Agama RI telah menerbitkan Pedoman Pencatatan Transaksi Keuangan Pesantren pada tahun 2020, penerapannya di lapangan masih belum merata.

Sejumlah penelitian telah membahas praktik akuntabilitas keuangan di pesantren. Namun, penelitian yang secara khusus mengulas akuntabilitas keuangan pesantren dari perspektif Islam dengan pendekatan *fenomenologis* masih terbatas. Penelitian terdahulu oleh Nurkhin et al. hanya membahas akuntabilitas pesantren secara umum dan belum menitikberatkan pada nilai-nilai Islam maupun

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

pendekatan *fenomenologis*.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan tidak dapat dilepaskan dari konsep hisab atau pertanggungjawaban yang diyakini akan dimintai perhitungan di akhirat. Akuntabilitas dalam Islam menjadi bagian dari nilai spiritual yang bukan hanya terkait urusan administrasi, melainkan juga terkait moralitas dan amanah. Hal ini menegaskan bahwa pengelola pesantren bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia sebagai pemberi dana, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Swt. sebagai pemilik hakikat seluruh harta. Pandangan ini diperkuat oleh Azwar (2023) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas Islam bersumber dari prinsip kejujuran dan transparansi yang ditekankan dalam Al-Qur'an serta Hadis, sehingga setiap transaksi dan penggunaan dana wajib dicatat secara benar.

Kemudian, penerapan akuntabilitas dalam organisasi Islam juga harus mempertimbangkan nilai tauhid sebagai fondasi utama. Tauhid menempatkan Allah Swt. sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi, sehingga praktik akuntansi bukan hanya alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Basri, Nabiha, dan Majid (2016) menekankan bahwa akuntansi dalam organisasi keagamaan Islam harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan tidak boleh hanya meniru sistem akuntansi konvensional yang cenderung materialistik. Oleh sebab itu, laporan keuangan pesantren idealnya tidak hanya menunjukkan aspek angka, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab moral dan sosial lembaga tersebut.

Di sisi lain, perkembangan regulasi akuntansi di Indonesia juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pengelolaan keuangan pesantren. Saat ini, pesantren sebagai lembaga nonlaba seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan standar pelaporan seperti ISAK 35, meskipun dalam praktiknya penerapan standar ini masih terbatas. Penelitian Safitri dan Narastri (2023) menemukan bahwa sebagian pesantren belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35 karena keterbatasan kemampuan SDM dan rendahnya pemahaman teknis akuntansi. Akibatnya, laporan yang dihasilkan masih sederhana dan hanya berisi catatan pemasukan serta pengeluaran tanpa adanya laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitas yang lengkap.

Selain keterbatasan standar dan SDM, tantangan besar lainnya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan pesantren. Banyak pesantren masih menggunakan pencatatan manual, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta sulitnya proses audit dan evaluasi. Marlina dan Azhari (2020) menegaskan bahwa lemahnya sistem administrasi keuangan pesantren disebabkan oleh kurangnya dukungan teknologi serta minimnya pelatihan akuntansi bagi pengurus. Padahal, digitalisasi keuangan dapat menjadi solusi penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

Dengan demikian, penelitian tentang akuntabilitas keuangan pesantren perlu terus dikembangkan untuk menemukan model sistem pelaporan yang tidak hanya sesuai standar modern, tetapi juga sesuai nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, *Shariah Enterprise Theory* (SET) menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena menekankan pertanggungjawaban kepada Allah, manusia, dan lingkungan secara seimbang. Triyuwono (2001) menjelaskan bahwa SET mengarahkan lembaga Islam untuk tidak hanya mengejar kepentingan material, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas organisasi menghasilkan manfaat sosial dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang dikembangkan oleh Moher dan rekan-rekannya pada tahun 2009. Metode SLR dipilih karena mampu membantu peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis berbagai penelitian yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Dengan metode ini, hasil penelitian dapat disusun berdasarkan bukti empiris yang kuat sekaligus mempermudah dalam menemukan kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Pencarian artikel dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi "akuntabilitas keuangan pesantren", "akuntabilitas perspektif Islam", "*Islamic accountability pesantren*", "*financial accountability boarding school*", "amanah *accountability Islamic organization*", "pondok pesantren *financial management*", "*Shariah Enterprise Theory* pesantren", dan "transparansi keuangan pesantren". Proses pencarian dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2024 dengan fokus pada artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2014–2024. Pemilihan rentang waktu tersebut disesuaikan dengan ketentuan jurnal yang mengutamakan penggunaan referensi dari sepuluh tahun terakhir.

1. Artikel yang dipilih dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
2. Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review.
3. Membahas akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam pada pesantren atau lembaga Islam yang sejenis.
4. Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
5. Diterbitkan pada tahun 2014–2024.
6. Tersedia dalam bentuk full text sehingga dapat dianalisis secara menyeluruh.

Sementara itu, artikel yang tidak dimasukkan dalam penelitian adalah artikel prosiding yang belum diterbitkan dalam jurnal, artikel yang tidak membahas aspek akuntabilitas atau keuangan,

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

artikel yang berfokus pada organisasi Islam di luar konteks pendidikan dan sosial kemasyarakatan, serta artikel yang terdeteksi sebagai duplikasi dari basis data lain.

Tahapan seleksi artikel mengikuti alur PRISMA yang terdiri dari empat tahap. Pada tahap identifikasi, ditemukan sebanyak 187 artikel dari berbagai basis data. Selanjutnya dilakukan skrining judul dan abstrak, sehingga sebanyak 142 artikel dinyatakan tidak relevan dan dikeluarkan dari proses seleksi. Setelah itu, tersisa 45 artikel yang dibaca secara penuh untuk menilai kelayakannya. Pada tahap penilaian kelayakan, sebanyak 30 artikel kembali dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti adanya artikel duplikasi, artikel prosiding, atau artikel yang tidak membahas aspek keuangan secara mendalam. Dengan demikian, tahap akhir menghasilkan 15 artikel yang digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara tematik dengan melihat pola-pola yang muncul dari seluruh artikel yang direview. Fokus analisis mencakup teori yang digunakan, metode penelitian yang dipakai, konteks penelitian pesantren, serta temuan-temuan utama yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam.

Proses seleksi artikel dalam penelitian *Systematic Literature Review* (SLR) dilakukan secara bertahap dan sistematis agar literatur yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Tahapan seleksi dimulai dari identifikasi artikel melalui basis data ilmiah yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak. Pada tahap ini, artikel yang tidak membahas akuntabilitas keuangan pesantren dalam perspektif Islam atau tidak sesuai dengan ruang lingkup penelitian dikeluarkan. Proses seleksi tersebut dilakukan dengan mengacu pada protokol PRISMA yang menekankan transparansi serta alur seleksi yang jelas agar hasil review lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Moher et al., 2009).

Selanjutnya, artikel yang lolos tahap skrining awal dibaca secara penuh (*full text screening*) untuk memastikan bahwa isi artikel memenuhi kriteria inklusi. Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan artikel berdasarkan kesesuaian topik, metode penelitian, tahun publikasi, serta kelengkapan data yang dibutuhkan. Artikel yang terdeteksi sebagai duplikasi, tidak tersedia dalam bentuk full text, atau hanya berupa prosiding yang belum terbit resmi dalam jurnal ilmiah dikeluarkan dari analisis. Tahapan evaluasi kelayakan ini penting karena mampu memastikan bahwa artikel yang digunakan benar-benar berkualitas dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian SLR (Nurkhin et al., 2024).

Setelah artikel terpilih, proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menemukan pola dan tema utama dari hasil penelitian terdahulu. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan artikel berdasarkan teori yang digunakan, metode penelitian yang dominan, serta fokus pembahasan seperti amanah, transparansi, peran kyai, dan tantangan standar

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

pelaporan keuangan pesantren. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjawab tujuan penelitian, sekaligus mengidentifikasi research gap yang dapat menjadi peluang penelitian lanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep SLR yang bertujuan merangkum temuan literatur secara komprehensif dan menghasilkan agenda penelitian masa depan yang lebih terarah (Moher et al., 2009, Rusli et al., 2024).

Selain itu, untuk menjaga objektivitas hasil review, penelitian ini juga menerapkan proses pencatatan data (data extraction) secara terstruktur dari setiap artikel yang terpilih. Data yang diekstraksi meliputi identitas penulis, tahun publikasi, judul artikel, jurnal penerbit, metode penelitian, teori yang digunakan, serta temuan utama yang relevan dengan akuntabilitas keuangan pesantren. Proses ekstraksi ini penting karena membantu peneliti menyusun perbandingan antar artikel secara konsisten serta meminimalkan bias interpretasi. Setelah itu, hasil ekstraksi disusun dalam bentuk tabel sintesis agar mempermudah pemetaan tren penelitian dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini sejalan dengan prinsip SLR berbasis PRISMA yang menekankan dokumentasi sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis literatur (Moher et al., 2009)

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Secara umum, artikel-artikel tersebut dapat dikategorikan berdasarkan metode penelitian, teori yang digunakan, dan fokus temuan. Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman dari seluruh artikel yang direview.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur Sistematis Akuntabilitas Keuangan Dalam Perspektif Islam Pada Pesantren

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Metode	Temuan Utama
1	Nurkhin, A., Rohman, A., & Prabowo, T.J.W. (2024)	Accountability of Pondok Pesantren, A Systematic Literature Review	Cogent Business and Management, 11(1)	Systematic Literature Review (PRISMA)	Akuntabilitas pesantren berfokus pada manajemen keuangan dan tata kelola, teori legitimasi paling sering digunakan, metode kualitatif dominan, akuntabilitas ganda (kepada Allah dan manusia)
2	Murdayanti, Y. & Puruwita, D. (2017)	Transparency and Accountability of Financial Management in Pesantren (Islamic Education Institution)	Advanced Science Letters, 23(11), 10721–10725	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan keuangan pesantren cenderung mengandalkan kepercayaan relasional antara pimpinan dan pemangku kepentingan, transparansi formal masih terbatas
3	Zulfathurrahmah, Z., Baehaqi, A., & Prabowo, T.J.W. (2024)	Accountability of Islamic Non-Governmental Organizations in	Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 7(1),	Kualitatif – Netnografi	Akuntabilitas lembaga Islam berbasis kepercayaan publik dan transparansi, ketidaksesuaian antara narasi

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Metode	Temuan Utama
		Indonesia: A Netnographic Study	68–82		kemanusiaan dan realitas penggunaan dana merusak kepercayaan
4	Gafur, A. (2017)	Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren	Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3), 583–599	Kualitatif Fenomenologis	Akuntabilitas pesantren dilandasi nilai amanah, bentuk pertanggungjawaban bersifat vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada manusia), kyai sebagai sentral pengelolaan
5	Basri, H., Nabiha, A.K.S., & Majid, M.S.A. (2016)	Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective	Gadjah Mada International Journal of Business, 18(2), 207–230	Kualitatif – Grounded Theory	Akuntansi dan akuntabilitas dalam organisasi keagamaan Islam harus mencerminkan nilainilai Islam, prinsip tauhid dan amanah menjadi fondasi pelaporan keuangan
6	Azwar (2023)	Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam	AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(6), 706–722	Kajian Pustaka (Library Research)	Al-Qur'an dan Hadis menegaskan kejujuran dan transparansi dalam transaksi keuangan, konsep hisab menjadi landasan akuntabilitas Islam
7	Kamaruddin, M.I.H. & Auzair, S.M. (2020)	Measuring '*Islamic accountability*' in Islamic Social Enterprise (ISE)	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(2), 303–321	Kualitatif – Studi Kasus	Akuntabilitas Islam mencakup dimensi spiritual, sosial, dan finansial, entitas sosial Islam memiliki standar akuntabilitas yang berbeda dari organisasi konvensional
8	Baehaqi, A., Faradila, N., & Zulkarnain, L. (2021)	Akuntabilitas Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Di Indonesia	Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, 10(1)	Studi Literatur	Pelaporan keuangan pesantren di Indonesia masih beragam dan tidak terstandarisasi, diperlukan standar khusus berbasis nilai Islam untuk pesantren
9	Wahyudin, A. (2021)	Prinsip Hablumminallah dan Hablumminannas Akuntabilitas Keuangan di Pesantren Attanwir Putri Sampang	EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 8(2), 64– 78	Kualitatif Fenomenologis	Akuntabilitas keuangan pesantren berpijak pada dua prinsip utama: tanggung jawab kepada Allah (hablumminallah) dan kepada manusia (hablumminannas), pengelolaan keuangan bersifat transparan berbasis kepercayaan
10	Widyastuti, A., Fadhli, M.M., & Astuti, W.W.	Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1293–	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan koperasi pesantren belum sepenuhnya menerapkan prinsip Sharia

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Metode	Temuan Utama
	(2022)	Dalam Bingkai Akuntabilitas Perspektif Sharia Enterprise Theory	1305		Enterprise Theory, pertanggungjawaban spiritual dan sosial masih perlu diperkuat
11	Jinan, M., Syapiuddin, M., & Nasri, U. (2024)	Holistic Integration: Syariah Finance Principles in Islamic Education Management	Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9(2), 1343–1350	Kualitatif – Studi Kasus	Integrasi prinsip keuangan syariah dalam manajemen pendidikan Islam terbukti meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan
12	Safitri, R.N. & Narastri, M. (2023)	Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai ISAK 35 Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(2), 1781–1789	Kualitatif Deskriptif	Pesantren belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35, laporan keuangan yang disajikan masih sederhana dan berbasis kas, diperlukan pelatihan akuntansi bagi pengurus
13	Waluya, A.H. & Mulauddin, A. (2021)	Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Q.S. Al Baqarah (2): 282284	Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12(2), 15–35	Kajian Tematik AlQur'an	Q.S. Al-Baqarah: 282 mengandung prinsip pencatatan transaksi yang menjadi dasar akuntansi Islam, akuntabilitas dan transparansi merupakan perintah agama bukan sekadar kewajiban hukum
14	Marlina & Azhari, I.P. (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar	COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 133–138	Deskriptif – Workshop & Pelatihan	Kesadaran pengelola pesantren tentang pentingnya akuntabilitas keuangan masih rendah, pencatatan manual dan kurang didukung teknologi informasi, pelatihan akuntansi meningkatkan pemahaman pengelola
15	Rusli, U., Haliah & Nirwana (2024)	Optimizing The Accountability Of Zakat Institutions With The Shariah Enterprise Theory Approach: A Systematic Literature Review	International Journal of Economics and Social Sciences	Systematic Literature Review	Pendekatan Shariah Enterprise Theory (SET) efektif untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, SET memadukan dimensi spiritual dan sosial dalam pertanggungjawaban keuangan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)

Berdasarkan Tabel 1, terdapat beberapa karakteristik penting yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian yang telah direview. Dari sisi metode penelitian, sebagian besar artikel menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 10 dari 15 artikel atau sekitar 66,7% memakai metode kualitatif, dan

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

tiga di antaranya secara khusus menggunakan pendekatan *fenomenologis*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai akuntabilitas keuangan pesantren dalam perspektif Islam lebih banyak diarahkan untuk memahami makna, pengalaman, serta nilai-nilai yang dijalankan oleh pengelola pesantren dalam praktik sehari-hari. Dari sisi teori, *Shariah Enterprise Theory* (SET) dan teori legitimasi menjadi kerangka teori yang paling sering digunakan. Kedua teori tersebut dinilai mampu menjelaskan praktik akuntabilitas pesantren tidak hanya dari aspek administratif dan keuangan, tetapi juga dari sisi sosial, moral, dan spiritual yang menjadi ciri khas lembaga Islam. Sementara itu, berdasarkan konteks penelitian, mayoritas studi dilakukan pada pesantren yang berada di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian tentang akuntabilitas pesantren di wilayah luar Jawa masih relatif sedikit, sehingga membuka peluang penelitian baru dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Dari segi waktu publikasi, penelitian mengenai akuntabilitas keuangan pesantren mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, terutama pada periode 2022–2024. Peningkatan jumlah publikasi tersebut menunjukkan bahwa isu tata kelola dan akuntabilitas keuangan pesantren semakin mendapat perhatian dalam kajian akademik.

PEMBAHASAN

Amanah sebagai Fondasi Akuntabilitas Keuangan Perspektif Islam

Hasil kajian dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah menjadi inti utama dalam praktik akuntabilitas keuangan di pesantren. Dalam penelitian *fenomenologis* yang dilakukan oleh Gafur, ditemukan bahwa pengelola pesantren tidak hanya menganggap amanah sebagai kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual kepada Allah Swt. yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Pemahaman tersebut membuat pengelola pesantren terdorong untuk bersikap jujur dan terbuka dalam mengelola keuangan, walaupun tidak selalu ada pengawasan resmi dari pihak luar.

Penelitian Wahyudin di Pesantren Attanwir Sampang juga memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah) dan hubungan manusia dengan sesama (hablumminannas) menjadi dasar dalam membangun sistem akuntabilitas di pesantren. Pengelola pesantren menyadari bahwa setiap dana yang digunakan bukan hanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Kesadaran inilah yang membentuk sikap tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pesantren.Selain itu, Azwar menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 282–283 memberikan pedoman tentang pentingnya pencatatan transaksi secara jelas, adanya saksi yang dapat dipercaya, dan dokumentasi yang baik dalam setiap aktivitas keuangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta atau dana.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan di pesantren tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan administrasi dan sistem pencatatan keuangan saja. Penanaman nilai-nilai keislaman, terutama mengenai amanah dan tanggung jawab, juga menjadi faktor penting. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan tata kelola keuangan pesantren akan lebih efektif apabila pelatihan akuntansi disertai dengan penguatan nilai spiritual dan etika Islam.

Selain menjadi nilai moral, amanah juga dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme kontrol internal yang kuat dalam pengelolaan keuangan pesantren. Ketika pengelola pesantren meyakini bahwa dana yang dikelola merupakan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka amanah berfungsi sebagai pendorong untuk menghindari penyalahgunaan dana, kecurangan, maupun pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan lembaga. Gafur (2017) menegaskan bahwa amanah dalam konteks pesantren bukan hanya berkaitan dengan hubungan sosial antara pengelola dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan spiritual bahwa setiap penggunaan dana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, amanah membentuk budaya transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan pesantren, sehingga praktik akuntabilitas tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesadaran religius yang tertanam dalam sistem nilai pesantren.

Selain itu, amanah juga menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pesantren, terutama karena pesantren banyak bergantung pada dukungan masyarakat dalam bentuk donasi, wakaf, dan kontribusi wali santri. Kepercayaan tersebut hanya dapat terjaga apabila pengelolaan dana dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan tujuan pemberian dana. Waluya dan Mulauddin (2021) menjelaskan bahwa ajaran Islam melalui Q.S. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan kewajiban pencatatan transaksi secara jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang menunjukkan bahwa transparansi merupakan bagian dari amanah itu sendiri. Oleh sebab itu, amanah tidak hanya diwujudkan melalui sikap moral pengelola, tetapi juga melalui praktik administratif seperti dokumentasi transaksi, pencatatan keuangan yang rapi, serta penyusunan laporan yang dapat dipahami oleh stakeholder. Dengan demikian, amanah berperan sebagai fondasi yang menghubungkan nilai spiritual dengan praktik tata kelola keuangan pesantren secara nyata.

Akuntabilitas Ganda (*Double Accountability*) sebagai Ciri Khas

Seluruh artikel yang direview menunjukkan bahwa akuntabilitas di pesantren memiliki dua bentuk pertanggungjawaban sekaligus, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dan pertanggungjawaban kepada manusia. Konsep ini berbeda dengan akuntabilitas dalam sistem konvensional yang umumnya hanya berfokus pada tanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemilik modal atau masyarakat. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya dinilai dari hubungan antar-manusia, tetapi juga dari hubungan manusia dengan Allah Swt. Kamaruddin dan Auzair menjelaskan

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

bahwa konsep *Islamic accountability* mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi spiritual yang berkaitan dengan tauhid, dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia (mu'amalah), serta dimensi lingkungan yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar dalam tata kelola lembaga Islam, termasuk pesantren.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurkhin dan timnya dalam penelitian *Systematic Literature Review* yang menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban ganda merupakan karakteristik yang paling sering ditemukan dalam penelitian mengenai akuntabilitas pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat memengaruhi cara pesantren mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Menurut Waluya dan Mulauddin, pertanggungjawaban kepada Allah Swt. bersifat menyeluruh karena setiap tindakan manusia diyakini akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kesadaran tersebut mendorong pengelola pesantren untuk tetap bersikap jujur dan amanah meskipun tidak ada pengawasan langsung dari manusia. Sementara itu, pertanggungjawaban kepada manusia diwujudkan melalui berbagai bentuk transparansi, seperti penyusunan laporan keuangan, rapat pengurus, penyampaian informasi keuangan kepada wali santri, serta bentuk pelaporan lainnya kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem akuntabilitas di pesantren tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga didasarkan pada kesadaran moral dan spiritual pengelolanya.

Tantangan Implementasi Akuntabilitas Formal

Nilai amanah dan tanggung jawab dalam Islam sebenarnya sudah sangat kuat diterapkan di lingkungan pesantren, tetapi praktik akuntabilitas keuangan secara formal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Marlina dan Azhari menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren masih menggunakan sistem pencatatan keuangan sederhana secara manual dan belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, Safitri dan Narastri menemukan bahwa penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas nonlaba masih belum banyak dilakukan di pesantren. Laporan keuangan yang dibuat umumnya hanya berupa catatan pemasukan dan pengeluaran berbasis kas tanpa penyusunan laporan keuangan yang lebih lengkap dan terstruktur.

Penelitian Baehaqi dan timnya mengungkapkan beberapa hambatan utama dalam penerapan akuntabilitas formal di pesantren. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, belum adanya standar akuntansi khusus yang sesuai dengan karakteristik pesantren dan nilai Islam, serta adanya anggapan bahwa sistem pelaporan formal kurang sesuai dengan budaya kepercayaan personal yang selama ini berkembang di pesantren. Sementara itu, Basri dan Nabiha menjelaskan bahwa sistem akuntansi pada lembaga keagamaan Islam seharusnya tidak hanya memenuhi aturan teknis akuntansi, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

dianut lembaga tersebut. Dengan demikian, sistem akuntansi di pesantren perlu disesuaikan dengan budaya dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar pengelolaannya. Sebagai solusi, Jinan dan rekan-rekannya menawarkan pendekatan integratif melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai syariah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan, bukan sebagai hambatan. Ketika pengelola pesantren memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari ajaran Islam, maka penerapan sistem akuntansi yang lebih baik akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.

Peran Kyai dan Implikasinya bagi Tata Kelola

Salah satu temuan yang paling sering muncul dalam literatur yang direview adalah kuatnya peran kyai dalam pengelolaan keuangan pesantren. Penelitian Murdayanti dan Puruwita menunjukkan bahwa dalam banyak pesantren, kyai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan keuangan. Kondisi ini berkaitan erat dengan budaya pesantren yang menempatkan kyai sebagai figur dengan otoritas moral dan spiritual tertinggi. Penelitian Zulfathurrahmah dan timnya mengenai organisasi Islam nonpemerintah menemukan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu figur tanpa adanya sistem pengawasan yang seimbang dapat menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas lembaga. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di pesantren, karena pengelolaan yang terlalu terpusat pada kyai berpotensi menimbulkan kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan apabila tidak didukung oleh mekanisme kontrol yang memadai.

Oleh karena itu, Nurkhin dan rekan-rekannya menyarankan adanya penguatan tata kelola pesantren melalui pembentukan komite keuangan atau sistem audit internal. Mekanisme tersebut dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan tanpa mengurangi kedudukan kyai sebagai pemimpin spiritual pesantren.

Agenda Penelitian Ke Depan

Berdasarkan sintesis dari 15 artikel yang direview, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi oleh peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian tentang akuntabilitas keuangan pesantren masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga diperlukan penelitian yang menjangkau pesantren di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, potensi teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pesantren belum banyak diteliti, padahal digitalisasi keuangan pesantren dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan akuntabilitas formal yang ada. Ketiga, penelitian longitudinal tentang perkembangan sistem akuntabilitas keuangan pesantren dari waktu ke waktu masih sangat langka. Keempat, diperlukan

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

penelitian tentang pengembangan standar akuntansi yang secara khusus dirancang untuk pesantren dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Pertama, agenda penelitian yang penting untuk dikembangkan adalah kajian mengenai digitalisasi tata kelola keuangan pesantren. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuka peluang besar bagi pesantren untuk memperbaiki sistem pencatatan, pengarsipan, serta pelaporan keuangan agar lebih efektif dan transparan. Namun, penelitian mengenai pemanfaatan sistem keuangan berbasis aplikasi atau software akuntansi di pesantren masih relatif sedikit. Padahal, keterbatasan pencatatan manual sering menjadi hambatan utama dalam menciptakan laporan keuangan yang sistematis. Marlina dan Azhari (2020) menegaskan bahwa lemahnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan proses administrasi keuangan pesantren kurang tertata dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan, sehingga digitalisasi menjadi solusi yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

Kedua, penelitian masa depan perlu memperdalam pembahasan mengenai implementasi standar pelaporan keuangan pesantren, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ISAK 35 sebagai pedoman laporan keuangan entitas nonlaba. Beberapa pesantren telah mencoba menerapkan standar tersebut, tetapi masih banyak yang belum mampu menyusun laporan secara lengkap karena keterbatasan SDM dan rendahnya pemahaman akuntansi. Safitri dan Narastri (2023) menemukan bahwa laporan keuangan pesantren umumnya masih berbasis kas sederhana dan belum memenuhi unsur laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat difokuskan pada strategi penerapan standar akuntansi yang lebih realistis dan sesuai dengan karakteristik pesantren.

Ketiga, agenda penelitian yang juga perlu diperluas adalah kajian tentang penguatan sistem audit internal dan mekanisme pengawasan dalam pesantren. Banyak pesantren masih mengandalkan kontrol moral berbasis kepercayaan kepada kyai, namun dalam tata kelola modern diperlukan sistem kontrol yang lebih formal untuk menjaga akuntabilitas publik. Nurkhin et al. (2024) menyebutkan bahwa sebagian besar literatur akuntabilitas pesantren masih menekankan aspek manajemen keuangan umum dan belum mendalami model audit internal yang cocok diterapkan di pesantren. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model audit internal berbasis nilai Islam yang tidak menghilangkan karakter khas pesantren.

Keempat, penelitian masa depan juga perlu menyoroti peran kyai secara lebih spesifik, terutama terkait bagaimana pengaruh kepemimpinan kyai terhadap transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan pesantren. Selama ini, banyak penelitian menjelaskan bahwa kyai merupakan figur sentral dalam pesantren, tetapi belum banyak penelitian yang mengkaji dampak dominasi kyai terhadap sistem pelaporan formal. Murdayanti dan Puruwita (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas pesantren sering

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

dibangun melalui kepercayaan personal kepada pemimpin, namun kondisi ini dapat menjadi tantangan ketika pesantren berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas formal dari pemerintah maupun lembaga donor. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana model kepemimpinan kyai dapat dikombinasikan dengan sistem administrasi modern agar akuntabilitas dapat berjalan seimbang.

Kelima, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian mengenai penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) sebagai kerangka pengukuran akuntabilitas pesantren secara holistik. Selama ini, SET banyak digunakan sebagai teori dasar, tetapi penerapan indikator praktis SET dalam laporan keuangan pesantren masih belum dikembangkan secara detail. Triyuwono (2001) menegaskan bahwa SET mengharuskan organisasi Islam mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat merumuskan model laporan keuangan pesantren berbasis SET yang tidak hanya memuat laporan finansial, tetapi juga laporan sosial dan spiritual agar akuntabilitas pesantren dapat tercermin secara lebih menyeluruh.

Keenam, agenda penelitian yang sangat penting adalah memperluas kajian akuntabilitas pesantren pada konteks wilayah yang lebih beragam. Sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi pesantren yang berada di Pulau Jawa, sedangkan pesantren di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia belum banyak dikaji secara akademik. Nurkhin et al. (2024) menyebutkan bahwa ketimpangan wilayah penelitian ini menyebabkan pemahaman tentang praktik akuntabilitas pesantren menjadi kurang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan studi komparatif antar daerah untuk melihat perbedaan budaya, tata kelola, serta model pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan oleh pesantren di berbagai wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap 15 artikel tentang akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam pada pesantren yang diterbitkan antara tahun 2014 dan 2024. Beberapa simpulan utama dapat ditarik dari sintesis literatur ini.

Pertama, akuntabilitas keuangan perspektif Islam di pesantren berlandaskan pada konsep amanah, hablumminallah, dan hablumminannas yang membentuk sistem pertanggungjawaban yang bersifat vertikal (kepada Allah Swt.) sekaligus horizontal (kepada sesama manusia). Dualitas akuntabilitas ini merupakan ciri khas yang membedakan akuntabilitas Islam dari akuntabilitas konvensional.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

Kedua, *Shariah Enterprise Theory* (SET) dan teori legitimasi merupakan kerangka teoretis yang paling dominan digunakan dalam literatur ini. SET terbukti relevan sebagai landasan konseptual yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan finansial dalam akuntabilitas lembaga Islam.

Ketiga, meskipun nilai-nilai Islam tentang kejujuran dan transparansi sangat kuat, implementasi akuntabilitas formal di pesantren masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan SDM akuntansi, belum adanya standar akuntansi khusus pesantren berbasis Islam, dan sentralitas kyai yang dapat menghambat mekanisme pengawasan kolektif.

Keempat, metode penelitian kualitatif, khususnya fenomenologi, merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menggali makna dan pengalaman yang dihayati oleh pengelola pesantren dalam praktik akuntabilitas keuangan mereka. Pendekatan ini mampu mengungkap dimensi spiritual yang tidak tertangkap oleh metode kuantitatif.

Implikasi penelitian ini bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah adalah perlunya pengembangan kerangka akuntabilitas yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam, khususnya amanah, ke dalam standar pelaporan keuangan pesantren. Bagi praktisi dan regulator, temuan ini merekomendasikan perlunya regulasi tata kelola keuangan pesantren yang mengakui keunikan dimensi spiritual akuntabilitas Islam sambil tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Agenda penelitian ke depan yang paling mendesak adalah penelitian tentang digitalisasi tata kelola keuangan pesantren dan pengembangan standar akuntansi pesantren berbasis nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aksana, D. S. S. (2024). The concept of amanah in Islamic banking and its responsibilities: An overview in Islamic economic philosophy. Journal of Economic Perspectives and Business Innovation, 1(2), 56–61.

Azwar. (2023). Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(6), 706–722. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592

Baehaqi, A., Faradila, N., & Zulkarnain, L. (2021). Akuntabilitas Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Di Indonesia. Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, 10(1). https://doi.org/10.32546/lq.v10i1.844

Basri, H., & Nabiha, A. K. S. (2016). Accounting system and accountability practices in an Islamic setting: A grounded theory perspective. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 24(4), 1561–1582

Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and accountability in religious organizations: An Islamic contemporary scholars' perspective. Gadjah Mada International Journal of Business, 18(2), 207–230. https://doi.org/10.22146/gamaijb.12571

Gafur, A. (2017). Akuntabilitas berbasis amanah pada pondok pesantren. Jurnal Akuntansi

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

Multiparadigma, 8(3), 583–599. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075

Hartono, P. (2020). Pedoman pencatatan transaksi keuangan pesantren. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama RI.

Jinan, M. (2024). Financial accountability and transparency in Islamic boarding schools. Journal of Islamic Economics Lariba. https://doi.org/10.20885/JIELariba.art39926

Jinan, M., Syapiuddin, M., & Nasri, U. (2024). Holistic integration: Syariah finance principles in Islamic education management. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9(2), 1343–1350. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2221

Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2020). Measuring '*Islamic accountability*' in Islamic social enterprise (ISE). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(2), 303–321. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0022

Marlina & Azhari, I. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pondok pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 133–138. https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.59

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2017). Transparency and accountability of financial management in pesantren (Islamic education institution). Advanced Science Letters, 23(11), 10721–10725. https://doi.org/10.1166/asl.2017.10138

Novarela, D., & Sari, I. (2015). Pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 3(2), 145-160. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.34

Nugraheni, P., & Anuar, H. A. (2014). Implications of shariah on the voluntary disclosure of Indonesian listed companies. Journal of Financial Reporting and Accounting, 12(1), 76–98. https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2011-0018

Nurkhin, A., Rohman, A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Accountability of pondok pesantren, a systematic literature review. Cogent Business and Management, 11(1), 2332503. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332503

Omar, A. R. C., Hussin, M. Y. M., & Muhammad, F. (2019). Assessing strategic orientation and mosques performance. Research in World Economy, 10(5), 30–35. https://doi.org/10.5430/rwe.v10n5p30

Rusli, U., Haliah, & Nirwana. (2024). Optimizing the accountability of zakat institutions with the *Shariah Enterprise Theory* approach: A *Systematic Literature Review*. International Journal of Economics and Social Sciences. https://doi.org/10.53555/ijess.v12i1.1

Safitri, R. N., & Narastri, M. (2023). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai ISAK 35 pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(2), 1781–

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4914-4930

1789. https://doi.org/10.37012/jms.v4i2.1610

Triyuwono, I. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 5(2), 131–145.

Wahyudin, A. (2021). Prinsip hablumminallah dan hablumminannas akuntabilitas keuangan di Pesantren Attanwir Putri Dusun Kajuk Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 8(2) 64–78. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v8i2.187

Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2021). Akuntansi: Akuntabilitas dan transparansi dalam Q.S. Al Baqarah (2): 282-284. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,12(2)

Widyastuti, A., Fadhli, M. M., & Astuti, W. W. (2022). Pengelolaan koperasi pondok pesantren mahasiswa Al Hikam dalam bingkai akuntabilitas perspektif sharia enterprise theory. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1293–1305. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3691

Zulfathurrahmah, Z., Baehaqi, A., & Wahyu Prabowo, T. J. (2024). Accountability of Islamic non-governmental organizations in Indonesia: A netnographic study. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 7(1), 68–82. https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.21596

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License